

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik sebagai lembaga yang menaungi seluruh umat Katolik di dunia, merupakan lembaga agama yang sangat terstruktur dari tingkat dunia hingga ke lingkup terkecil di keluarga. hierarki yang sangat rapi ini, menjadikan sikap dan langkah yang diambil oleh Gereja Katolik di seluruh dunia berlandaskan pada satu sikap dan langkah dari Vatikan, sebagai pusatnya. Dalam hal politik misalnya, Gereja Katolik memiliki berbagai dokumen yang menyatakan sikap dan posisinya memandang politik. Tak hanya itu, sejumlah strategi dan langkah menyikapi dunia di masa modern ini juga telah terumuskan dalam dokumen-dokumen Gereja, salah satunya ialah hasil Konsili Vatikan II, yaitu *Gaudium et Spes*. Dalam hal politik dan partisipasi umat Katolik, Gereja telah secara gamblang menuangkannya pada *Gaudium et Spes* nomor 75 dan 76. Dijelaskan posisi Gereja tidak dapat dicampur-adukan dengan kekuasaan negara, namun Gereja hendak turut serta dalam upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Tak hanya itu, Gereja Katolik juga menyampaikan salah satu strateginya untuk mendorong partisipasi politik umatnya dalam *Gaudium et Spes* nomor 75, di mana secara intensif Gereja akan mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab politik umatnya sebagai warganegara.

Berbagai sikap, langkah dan strategi yang tertuang dalam dokumen-dokumen tadi, kemudian akan diterjemahkan oleh otoritas Gereja Lokal dengan melihat situasi kondisi yang dihadapi Gereja lokal, termasuk diterapkan oleh Gereja

Katolik di Indonesia. Meskipun strategi telah tertuang jelas dalam dokumen resmi Gereja dan ditandatangani Paus, sebagai pimpinan Gereja Katolik dunia, namun tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik umat Katolik tidak mudah dicapai. Di tiap-tiap Gereja lokal memiliki hambatannya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Keuskupan Agung Semarang sebagai salah satu otoritas Gereja lokal menghadapi permasalahan tidak optimalnya partisipasi umat Katolik, yang mana sebagian besar hanya berpartisipasi pada kegiatan pemilihan sebagai *voters*. Di Keuskupan Agung Semarang, ditemukan sejumlah hambatan seperti kurangnya minat dalam politik dan juga rasa minder sebagai minoritas di Indonesia

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat beragam komposisi masyarakatnya. Keragaman komposisi sosial ini dapat dilihat dari banyaknya suku, etnis, hingga agama yang ada. Keberagaman di Indonesia tentu banyak mempengaruhi dinamika sosial di dalam masyarakat termasuk dalam bidang politik. Perilaku politik seseorang tak jarang dipengaruhi oleh karakteristik sosialnya, mulai dari suku, etnis, hingga agama. Hubungan agama dengan kehidupan sehari-hari manusia, kemudian memunculkan suatu konsep yang dikenal dengan *Homo Religiosus*. *Homo Religiosus* adalah manusia yang hidup dengan nilai-nilai religius. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci kemudian mempengaruhi dan membentuk corak serta cara kehidupannya¹. Bila dikaitkan dengan politik, perilaku politik individu dapat dipengaruhi oleh doktrin agama, gerakan dari lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat (ormas) keagamaan,

¹ A Sudrajat, *Agama dan Perilaku Politik*. Jurnal Humanika: UPT MKU-UNY 2002, hlm 1

maupun anjuran-anjuran dari tokoh agama, termasuk didalamnya mendorong partisipasi politik para penganutnya.

Realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bagaimana agama melalui tokoh agama dan lembaga agama turut memiliki pengaruh dalam dunia politik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia, yang dirilis November 2018. Rilis survei tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan politik mencapai angka 51,7 persen. Angka tersebut jauh mengungguli tokoh dan profesi lainnya, seperti politisi yang hanya mencapai 11 persen dan pengamat politik pada angka 4,5 persen².

Memandang bahwa basis keagamaan penting dalam mendorong partisipasi dan menciptakan pemilihan umum yang damai, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tingkat Kabupaten/Kota³. Relawan Demokrasi dibagi dalam 10 tim basis pemilih, salah satunya adalah basis keagamaan. Relawan Demokrasi basis Keagamaan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, memiliki tugas melakukan sosialisasi mengenai Pemilu serentak 2019 dan melakukan pendidikan pemilih kepada umat dari tiap agama dengan salah satu tujuannya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Bicara mengenai partisipasi politik, banyak tokoh-tokoh besar yang menulis buku-buku dan kajian mengenai partisipasi politik. Salah satu tokoh tersebut ialah

² Ihsanuddin, *Survei LSI : Imbauan Tokoh Agama Paling Berpengaruh dalam Pilpres 2019*, dimuat dalam laman KOMPAS.COM, 14 November 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/14/15300771/survei-lsi-imbauan-tokoh-agama-paling-berpengaruh-dalam-pilpres-2019>, diakses 11 Januari 2019

³ KPU Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019*, hlm 2

Ramlan Surbakti. Dalam bukunya “*Memahami Ilmu Politik*”, mendefinisikan, partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya⁴. Tokoh lain yang juga mencoba mendefinisikan mengenai partisipasi politik ialah Miriam Budiardjo. Dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, Miriam Budiardjo menyampaikan definisi umum mengenai partisipasi politik yaitu;

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung. Mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.⁵

Dalam definisi tersebut, Miriam Budiardjo mencoba memperluas definisi dari partisipasi politik. Partisipasi politik tidak hanya diartikan sebagai kegiatan perorangan warga negara, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang atau gerakan sosial tertentu juga dianggap sebagai partisipasi politik. Seperti yang sebelumnya telah dibahas, bahwa agama dapat turut mempengaruhi pola kegiatan dan perilaku manusia, termasuk di dalamnya politik. Hal ini didukung oleh Milbrath yang berpendapat bahwa ada beberapa faktor pendorong partisipasi politik, salah satunya adalah karakteristik sosial yang didalamnya terdapat jenis status sosial ekonomi, ras, etnis dan juga agama⁶. Partisipasi politik, juga dapat dikelompokkan menjadi partisipasi konvensional, yaitu dengan *electoral* maupun

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992. hlm 140

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm 367

⁶ Ade Aditia Armi. *Studi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013*. Journal FISP Volume 1 no 2. 2014, hlm 6

non-electoral activity, serta partisipasi nonkonvensional, yang didalamnya termasuk kegiatan demonstrasi, menduduki fasilitas umum, hingga kudeta. Dalam penelitian ini, peneliti hendak memberi batasan pembahasan mengenai partisipasi politik dalam bentuk konvensional, yaitu *electoral activity* dan *non-electoral activity*

Masing-masing agama memiliki pandangan dan sikapnya dalam politik dan partisipasinya. Agama Islam, sebagai agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia, telah banyak berpartisipasi dalam bidang politik di Indonesia, khususnya melalui berbagai ormas keagamaannya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa orde lama, NU telah berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. Setelah Berpisah dari Masyumi, pada tanggal 15 April 1952, NU menyatakan diri sebagai partai politik. Pada masa orde baru, NU dan partai islam lainnya difusi ke dalam PPP. Pasca masa orde baru, meskipun tidak berdiri sebagai partai politik sendiri, keinginan anggota elite NU untuk terlibat dalam politik tidak dapat dipungkiri dengan didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa oleh Abdurahman Wahid. Kelahiran PKB atas rekomendasi langsung dari PBNU memberi sinyal kuat akan keinginan NU untuk berkiprah atau minimal memiliki bahtera sendiri dalam mengarungi samudera perpolitikan Indonesia yang sedang bergelora⁷.

Selain ormas keagamaan, kita juga dapat melihat ada beberapa partai politik yang berideologi Islam ikut dalam kontestasi pemilu, seperti PKS, PKB, dan PPP. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa penganut agama Islam telah memiliki

⁷ Munawir Harris. *Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat Dalam Lintas Sejarah*. Al-Tahrir Vol.15 No. 2. 2015. hlm 299

wadah yang sejalan dengan keyakinannya untuk terlibat dalam bidang politik, melalui berbagai ormas dan partai politik berideologikan Islam yang ada. Lebih dari itu, ormas dan partai politik tersebut dapat mempengaruhi perilaku politik individu, khususnya tingkat partisipasi politik individu.

Selain Agama Islam, Agama Kristen Protestan, memiliki pandangan tersendiri terhadap politik dan partisipasinya. Ajaran Kristen memandang politik sebagai salah satu sarana untuk membawa kedamaian di dunia, partisipasi politik yang diambil diharapkan tidak hanya berorientasi kekuasaan semata. Gereja dan umat hendaknya mendukung pemerintah agar program dan cita-citanya tercapai, oleh karena itu umat Kristen didorong tidak hanya mengurus hal rohaniah saja serta tidak bersikap apatis terhadap kondisi sekitar. Gereja Kristen juga memandang politik sebagai suatu tanggung jawab sosial keterlibatan umat Kristen Protestan sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masuk dalam kancah perpolitikan⁸. Hal ini kemudian dapat kita lihat dengan pernah munculnya beberapa partai berideologikan Kristen, pada masa orde lama ada Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan pasca orde baru runtuh muncul Partai Kristen Nasional dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Sementara itu, perspektif lain datang dari Agama Buddha yang memandang politik merupakan suatu penggunaan kekuatan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas⁹, yang juga harus dilakukan selaras dengan ajaran universal Buddha yaitu nir-kekerasan. Dalam ajarannya Buddha sendiri memberikan sepuluh patokan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang

⁸ Murni Hermawan Sitanggang. *Pendidikan Agama Kristen 2017*. Universitas Jember. 2017. hlm 58

⁹ Sri Dhammanada. *What Buddhist Believe*. Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society Malaysia. 2002. hlm 314.

sering kali disebut dengan *Dasa Raja Dharma*. Namun dalam ajarannya pula, Buddha secara tegas memperingatkan supaya tidak menyalahgunakan kekuatan agama untuk mendapatkan kekuatan politik, khususnya bagi mereka yang telah berkomitmen untuk berfokus dalam kegiatan rohaniyah dan meninggalkan keduniawian¹⁰.

Ajaran Agama Hindu yang juga berkembang di Indonesia, memiliki pandangan tersendiri mengenai politik. Agama Hindu dalam memandang politik menekankan pada tujuan politik itu sendiri, di mana harus ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ajaran agama Hindu sendiri juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, di mana dalam ajarannya pun memberi kebebasan bagi umatnya untuk memilih atau mencari jalan meyakini Tuhan. Ajaran agama hindu mendorong sikap kritis dalam kehidupan berpolitik khususnya dalam berdemokrasi. Dengan sikap kritis tadi, dianggap akan membawa suatu *output* yang berkualitas. Selain sikap kritis, ajaran agama Hindu juga mendorong menjadi pemilih yang cerdas dan juga jujur, hal ini ditunjukkan dengan salah satu *sloka* dalam ajaran Hindu, yang berbunyi, "Walaupun kata-kata itu datang dari seorang bocah kecil, tetapi jika kata-katanya masuk akal, maka harus diterima dan menolak kata-kata yang tidak masuk akal walaupun dinyatakan datang dari Yang Kuasa"¹¹. Sementara dalam Agama Konghucu dinyatakan bahwa ada titik singgung antara Agama dan Politik. Agama menjadi dasar moralitas bagi setiap nilai dan tindakan politik. Politik tanpa berlandaskan

¹⁰ Sri Dhammanada. *Ibid.* hlm 320.

¹¹ I Made Rudita. *Hindu dan Demokrasi*. Jurnal Advokasi. Vol 6 No 1. 2016. hlm 81

moralitas keagamaan, atau moralitas ketuhanan merupakan hal yang “ditabukan” menurut pandangan Konghucu¹².

Agama Katolik yang juga menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, telah memiliki pandangan dan sikap terhadap politik berdasarkan dokumen-dokumen Gereja Katolik di tingkat dunia. Agama yang pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis tahun 1534 ini, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, penganutnya telah mencapai sekitar 6.907.873 jiwa. Sebagai agama terbesar ketiga di Indonesia, Agama Katolik dapat memberi warna dan pengaruh sendiri dalam bidang politik di Indonesia. Seorang tokoh Agama Katolik yang juga telah diangkat sebagai pahlawan nasional, Mgr. Soegijapranata, sebagai Uskup Katolik asli Indonesia yang pertama, beliau menyerukan suatu slogan **“100% Katolik, 100% Indonesia”**. Sebuah ungkapan yang mencerminkan ajakan untuk mengintegrasikan sekaligus antara kekatolikan dan nasionalisme¹³. Slogan ini, dapat dimaknai sebagai ajakan untuk umat Katolik supaya turut berperan dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya di masa awal kemerdekaan. Hal ini ditegaskan oleh Mgr. Soegijapranata dalam pidato pembukaan KUKSI (Kongres umat Katolik Seluruh Indonesia) II pada tahun 1954, yang dikutip dari buku *“Kilasan Kisah Soegijapranata,”*

yang diperhatikan oleh masyarakat kita adalah apa Gereja Katolik beserta umatnya itu ada gunanya, berdaya guna untuk negara dan Rakyat Indonesia ? Apakah umat Katolik Indonesia

¹² Budi S. Tanuwibowo, *Agama, Politik & Negara Menurut Perspektif Khonghucu*, <http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-menurut-perspektif-khonghucu.html>, diakses 7 Desember 2018

¹³ Budi Subanar. *Kilasan Kisah Mgr. Soegijapranata*, SJ. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. 2012. hlm 17

memiliki keberanian yang tangguh untuk turut mengisi kemerdekaan -yang telah berhasil dijangkau-¹⁴

Seruan dari Mgr. Soegijapranoto tersebut, menjadi dorongan tersendiri untuk Umat Katolik Indonesia turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan negara. Seperti yang telah diulas di awal, strategi Gereja untuk meningkatkan partisipasi umatnya telah tertuang dalam *Gaudium et Spes* merupakan dokumen hasil Konsili Vatikan II, suatu pertemuan akbar yang dihadiri oleh Uskup-uskup seluruh dunia. Dari berbagai sikap dan strategi dalam dokumen hasil pertemuan pimpinan Gereja sedunia ini, dapat kita lihat bahwa Gereja memandang penting politik dan partisipasi didalamnya sebagai suatu hak dan kewajiban umat Katolik sebagai warga negara.

Perspektif Gereja Katolik ini kemudian diwujudkan dengan keluarnya dokumen dari otoritas Gereja lokal, yaitu Keuskupan juga seringkali mengeluarkan dokumen-dokumen Gereja berkaitan dengan politik. Keuskupan merupakan suatu pembagian wilayah dalam Gereja Katolik. Keuskupan dapat diibaratkan sebagai suatu provinsi dalam Gereja Katolik, di Indonesia terdapat beberapa keuskupan, salah satunya Keuskupan Agung Semarang (KAS), KAS memiliki wilayah yang cukup luas, mencakup wilayah Jawa Tengah bagian Timur (kecuali wilayah Kabupaten Rembang dan Blora) dan Daerah Istimewa Yogyakarta. KAS mengeluarkan Arah Dasar Keuskupan 2016-2020, yang mana salah satu objektnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan umat, termasuk didalamnya pada bidang politik. Dengan adanya dokumen dan tujuan jelas yang dituliskan dalam dokumen tersebut, peneliti hendak memberikan batasan

¹⁴ Budi Subanar, *Ibid*, hlm 18

pembahasan dalam penelitian ini, dengan melihat Strategi yang diterapkan Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang, selama berlakunya Arah Dasar Keuskupan tersebut, yang mana berarti strategi dari tahun 2016 hingga 2020. Objektif atau tujuan yang sama, juga disinggung kembali dokumen turunan Arah Dasar yaitu Arah Pastoral 2018, semacam visi tahunan Keuskupan. Dalam arah pastoral tersebut diangkat tema “*Menjadi Gereja inklusif, inovatif, transformatif yang bekerjasama sinergis dalam masyarakat multikultural mewujudkan kesejahteraan*”. Salah satu poin yang perlu dicermati ialah inklusif, yang berarti turut terlibat dalam usaha-usaha bersama membangun Gereja dan Bangsa. Keterlibatan untuk membangun bangsa salah satunya dilakukan melalui bidang politik. Dalam Arah Pastoral tersebut, Uskup Mgr. Rubiyatmoko, sebagai pemimpin Keuskupan Agung Semarang, turut menekankan pentingnya peran umat Katolik dalam politik, salah satunya melalui *electoral activity*, yaitu Pilkada 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Berbagai kegiatan tersebut dipandang sebagai suatu kegiatan besar yang menanti keterlibatan umat Katolik. Selain dokumen Arah Pastoral, seruan untuk turut berpartisipasi dalam politik, salah satunya melalui *electoral activity*, yaitu dalam Pilkada serentak, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan presiden, juga kembali ditekankan dalam Surat Gembala Keuskupan Agung Semarang, yang ditulis 5 Agustus 2018, di mana umat Katolik yang sudah memiliki hak pilih hendaknya menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu perwujudan iman dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam dokumen tersebut, juga disebutkan akan ada dokumen surat gembala yang akan dikeluarkan secara khusus membahas mengenai pesta demokrasi 2019.

Perhatian Gereja Katolik terhadap politik juga ditunjukkan dengan adanya kerja sama dengan KPU, berdasarkan wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan dengan informan Pastor Raymandus Sugihartanta, Pr, selaku salah satu Pastor Keuskupan Agung Semarang yang juga sebagai Ketua Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) , ditemukan adanya pendidikan politik dari KPU yang dilakukan di forum umat Gereja bekerja sama dengan pengurus Gereja. PK4AS sendiri merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh KAS untuk menjadi penghubung dan penggerak karya kategorial umat di bidang sosial-politik-kemasyarakatan¹⁵.

Sebagai Agama yang terorganisasi dari tingkat dunia hingga lingkungan, menjadi salah satu kemudahan bagi Gereja Katolik Indonesia untuk mendorong individu umat maupun organisasi masyarakat katolik untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, berbagai dokumen yang telah dikeluarkan oleh otoritas gereja tersebut, tidak lantas dapat dengan mudah meningkatkan partisipasi politik umat Katolik. Permasalahan yang muncul di Keuskupan Agung Semarang, umat Katolik sebagian besar hanya berpartisipasi pada tingkat paling dasar yaitu menjadi pemilih dan memberikan suara Seperti telah diulas di awal, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Gereja Katolik dalam upayanya meningkatkan partisipasi politik umatnya. Dalam wawancara pendahuluan dengan Pastor Raymandus Sugihartanta, Pr, menurut informan, tantangan utama saat ini adalah rendahnya kesadaran politik umat Katolik. Salah satu penyebab kurangnya ketertarikan dan kesadaran politik ini merujuk pada pandangan di mana politik

¹⁵ Vincent Suriadinata, "Kerawam Kevikepan Surabaya Utara Siap Menembus Batas", www.sesawi.net, diakses 19 November 2019

dianggap hanya dikuasai oleh kelompok elite saja. Tidak hanya itu, merasa sebagai minoritas, yang dirasa tidak akan terdengar suaranya dan tidak dapat berdampak signifikan, menjadi satu penyebab umat Katolik relatif rendah minat politiknya. Selain rendahnya kesadaran politik, berdasarkan penelitian "*Gereja dan Pemilu*" oleh Agustina Rukmindani, yang kemudian dibukukan ada beberapa pihak yang melihat keterlibatan Gereja Katolik dalam ranah politik adalah sesuatu hal yang tabu¹⁶.

Penelitian mengenai Gereja Katolik Indonesia dan Politik, spesifik dalam hal partisipasi politik, masih sangat jarang ditemukan. Kebaruan penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dalam kajian-kajian peran Gereja Katolik untuk meningkatkan partisipasi politik di Indonesia, khususnya Keuskupan Agung Semarang. Maka, dari pemaparan empirik serta teoritis di latar belakang yang telah peneliti uraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Strategi Gereja Katolik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang**" yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian-bagian selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Gereja Katolik dalam upaya peningkatan partisipasi politik umatnya di Keuskupan Agung Semarang ?

¹⁶ Agustina Rukmindani Trisrini "*Gereja dan Pemilu*". Yogyakarta. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM. 2007. hlm xii

1.3. Tujuan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan Gereja Katolik sebagai lembaga keagamaan tertinggi Agama Katolik dalam meningkatkan partisipasi politik di Keuskupan Agung Semarang.

1.4. Manfaat

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan tentang partisipasi politik khususnya yang berkaitan dengan lembaga keagamaan.
- b. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi menambah pengetahuan mengenai praktik dan bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada di masyarakat

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, agar dapat lebih memahami strategi yang dilakukan Gereja Katolik dalam meningkatkan partisipasi politik di Keuskupan Agung Semarang
- b. Bagi Masyarakat, agar mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik dan kaitannya dengan karakteristik sosial seperti agama.
- c. Bagi Gereja Katolik, agar dapat menjadi salah satu masukan mengenai strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik umatnya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Hubungan Agama dan Negara

Agama telah menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama sendiri adalah cara yang dipakai manusia dalam menghidupkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di atas jangkauan manusia yaitu kekuatan yang gaib¹⁷. Agama juga dianggap sebagai petunjuk hidup manusia, mengenai benar-salah dan baik-buruk, petunjuk-petunjuk tersebut kemudian dianggap berasal dari Tuhan. Sementara itu, negara didefinisikan oleh Soltau sebagai agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat¹⁸. Menurut William James, peran agama sangat penting dalam keseharian manusia, hal ini juga didukung oleh pernyataan Emmons & Pultzian, menyebutkan bahwa agama merupakan kekuatan sosial yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sosial¹⁹. Hal ini sedikit menggambarkan bagaimana agama turut berperan dalam dinamika kehidupan sosial dan bernegara. Mengulas lebih jauh, hubungan yang terjalin antara agama dan negara, setidaknya terdapat tiga paham yang menggambarkan hubungan kedua institusi ini, meliputi :

A) Paham Teokrasi

Dalam paham ini, digambarkan bahwa negara dan agama merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan, karena negara dalam menjalankan

¹⁷ Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2013. hlm 187.

¹⁸ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.* Hlm 48

¹⁹ Fridayanti, *Religiusitas, Spiritualitas dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam*"
Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2015, Vol. 2, No. 2, 2015, Hlm: 199

pemerintahannya berdasarkan firman-firman Tuhan. Tata kehidupan sosial masyarakat dan urusan-urusan politik, dipandang sebagai perwujudan dari firman Tuhan. Dalam perkembangannya, paham teokrasi dikategorikan dalam dua bagian, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Paham teokrasi langsung memandang bahwa negara dan pemerintahannya merupakan wujud otoritas Tuhan secara langsung, dalam artian negara hadir karena kehendak Tuhan dan mereka yang memerintah dipandang pula sebagai Tuhan. Sedangkan itu, paham teokrasi tidak langsung, dimaknai pemerintahan negara dijalankan oleh pemimpin, baik raja maupun kepala negara yang menjadi perwakilan dari otoritas Tuhan di dunia.

B) Paham Sekularistik

Paham sekularistik secara tegas memisahkan antara agama dan negara. Paham ini memandang urusan tata negara tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Dalam pembentukan peraturan pun, norma hukum dan norma agama dipisahkan, di mana norma hukum yang terbentuk merupakan kesepakatan dari masyarakat. Meskipun dipisahkan, negara-negara yang menganut paham ini membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama dan melakukan peribadatan, negara tidak mengintervensinya.

C) Paham Komunisme

Paham komunisme meyakini peran agama dalam negara harus ditekan, karena pada hakikatnya yang terpenting dalam negara adalah mengenai materi. Sementara agama dipandang oleh paham ini sebagai perwujudan dari fantasi atau angan-angan manusia itu sendiri. Sementara negara dianggap

lebih realistis karena dianggap sebagai hasil dari pola kehidupan antar manusia.²⁰

Tidak hanya dengan paham-paham tersebut, untuk melihat lebih dalam relasi agama dan negara, terdapat setidaknya tiga paradigma yang bisa digunakan untuk menggambarkannya, antara lain :

A) Paradigma Integralistik

Paradigma ini memandang agama dan negara sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. di mana wilayah bahasan agama didalamnya juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan negara dan politik. Sementara itu, negara dipandang sebagai suatu lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Menurut Picostory dalam Wahyudi (2001:25), paradigma ini kemudian melahirkan yang disebut dengan negara agama. Pemerintahan dianggap dilaksanakan berdasarkan kedaulatan ilahi dan pemimpin memegang dua peran, sebagai pemimpin negara dan agama. Hukum yang berlaku pun bersumber dari hukum-hukum agama.

B) Paradigma Simbiotik

Paradigma ini melihat antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling memerlukan dan memberikan dampak timbal balik. Dengan adanya negara, agama dapat berkembang di wilayah tertentu. Begitu pula dengan adanya agama, negara memiliki suatu panduan atau tuntunan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Namun, dalam paradigma ini ada kecenderungan penganut agama mayoritas mendapatkan keistimewaan

²⁰ Edi Gunawan. "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam". *Kuriositas*. Vol 11. no 2. 2017. hlm 112-113

melegitimasi pelaksanaan hukum agamanya menjadi sumber hukum positif negara tersebut.

C) Paradigma Sekularistik

Pandangan ini menilai konsep agama merupakan suatu tatanan yang sudah kuno dan usang. Muncul anggapan dalam paradigma ini bahwa rasionalitas intelektual manusia mampu memunculkan tuntunan di berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, hingga politik tanpa memerlukan turunnya wahyu. Maka manusia mulai membangun berbagai bentuk ilmu berdasarkan humaniora, seperti hukum, pengetahuan alam, dan etika tanpa bantuan Tuhan maupun agama.²¹

Bila mengulas relasi agama dan negara, tentu tidak akan lepas dari perkembangan agama di negara tersebut dan situasi dalam negara tersebut. Realitas yang terjadi di sepanjang sejarah Indonesia, hubungan antara agama dan negara dapat dikelompokkan dalam 4 golongan,

A) Golongan pertama yang menganut paradigma integralistik, di mana agama dan negara dijalankan secara bersamaan dan terintegrasi. Dua hal tersebut dipandang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Lebih jauh lagi, golongan ini memandang bahwa pelaksanaan otoritas pemerintahan harus berdasarkan dengan agama. Hukum negara dapat bersumber dari hukum agama. Golongan ini ditemukan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam.

²¹ Nasaruddin. *Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dan Agama*. Jurnal Hunafa. Vol 6. No 2. 2009. hlm 214-217

B) Golongan kedua berpendapat bahwa hubungan antara negara dan agama akan membawa pada pusaran konflik berkepanjangan. Kedua entitas ini akan saling menafikan satu sama lain karena dasar hukumnya yang berbeda.

C) Golongan ketiga memandang hubungan agama dan negara sebagai hubungan yang dinamis dan dialektis. Dalam artian, agama dijadikan suatu dasar penyelenggaraan pemerintahan, dalam bentuk tatanan moral dan etika. Sementara itu, negara akan menjamin setiap umat beragama memeluk agama dan bebas beribadat sesuai keyakinannya

D) Golongan keempat memandang agama dan negara secara sekularistik yang artinya terpisah. Namun dalam perjalanannya, norma agama dapat diterapkan dalam ritual-ritual keagamaan, dan menjadi simbol pengayoman negara kepada warganya.²²

1.5.2. Strategi

Kata strategi seringkali diidentikan dengan taktik²³. Secara harafiah, strategi berasal dari kata berbahasa Yunani, yakni *strategos* yang memiliki arti “Jenderal”. Definisi secara harafiah tadi membawa strategi secara tidak langsung selalu dikaitkan dengan seni para jenedral dalam memimpin untuk memenangkan perang²⁴. Beberapa tokoh ahli juga mencoba mendefinisikan mengenai strategi, Benjamin Tregoe dan William Zimmerman mencoba memberi pendapat mereka mengenai definisi strategi sebagai suatu kerangka yang membimbing dan mengarahkan pilihan-pilihan yang memantapkan arah

²² Muhammad Soleh Aminullah. “Agama dan Politik: Studi Pemikiran tentang Relasi Agama dan Negara”. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial. Vol 14. No 1. 2020. hlm 40

²³ Fitri Lukiastuti dan Muliawan Hamdani, *Manajemen Strategis dalam Organisasi*. Yogyakarta : CAPS. 2011. hlm 4.

²⁴ Fitri Lukiastuti dan Muliawan Hamdani. Ibid, hlm. 3.

dan karakteristik suatu organisasi²⁵. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai rencana jangka panjang yang diikuti suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu²⁶. Pendekatan Klasik berdasarkan pendapat Mintzberg (dalam Whittington 2001: 15) menyatakan bahwa

strategi berasal dari proses pemikiran yang kuat dari dalam diri. Yang mana strategi dihasilkan dari decision making yang kemudian dapat diimplementasikan. Perumusan strategi harus melalui analisis rasional yang kemudian menghasilkan rencana-rencana untuk penentuan tujuan jangka panjang²⁷.

Maka dalam menyusun suatu rancangan strategi, diperlukan cara berpikir yang strategis. Wahyudi (1996) dikutip dari Dr. Quadrat Nugraha, menyampaikan ada 5 tahapan dalam berpikir strategis;

1. Identifikasi Masalah

Proses awal sangat penting untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi. Sangat penting untuk melihat berbagai masalah-masalah strategis beserta gejala-gejala yang mengikutinya

2. Pengelompokan Masalah

Dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah, di mana masalah yang telah teridentifikasi dikelompok dalam beberapa klasifikasi.

3. Proses abstraksi

Melihat masalah-masalah yang krusial sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebab atau pemicu masalah tersebut. Tahapan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan penyusunan metode pemecahannya.

²⁵ Fitri Lukiastuti dan Muliawan Hamdani. Ibid, hlm.4.

²⁶ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*. Bandung : PT Refika Aditama. 2016, hlm 2.

²⁷ Sri Hidayat, "Perubahan Filosofi Perencanaan Melalui Pendekatan Berpikir Strategis dalam Kerangka Kerja KLHS", Sulawesi Utara: dipublikasikan melalui Academia.edu, 2017, hlm 9, diakses 1 Mei 2020

4. Penentuan Metode Pemecahan Masalah

Setelah diketahui faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul, maka disusun metode atau rencana memecahkan masalah tersebut.

5. Perencanaan implementasi

Dalam tahap ini strategi teknis dan konkret direncanakan sebagai implementasi pemecahan masalah yang ada.²⁸

Suatu organisasi maupun perusahaan tidak dapat sembarangan dalam menyusun strategi, karena dapat berdampak langsung terhadap organisasinya. Beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh organisasi saat akan menyusun suatu strategi, antara lain :

1. Mengidentifikasi lingkungan yang dihadapi dan menetapkan visi misi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal berkaitan dengan peluang, kekuatan ancaman, dan kelemahan
3. Menentukan ukuran keberhasilan strategi
4. Menentukan tujuan dan target terukur
5. Menentukan strategi paling sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang²⁹

Secara umum, strategi dapat dikelompokkan dalam menurut pelaksanaannya di tiap tingkatan organisasi. Tingkatan tersebut meliputi, strategi korporasi, kedua strategi bisnis unit, dan strategi fungsional. Strategi korporasi dibuat oleh pimpinan dilevel puncak, yang menggambarkan tentang

²⁸ Quadrat Nugraha, "Manajemen Strategis", Jakarta : Universitas Terbuka, 2014, hlm. 7

²⁹ Zulfikar. Dkk, *Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*. Jurnal Administrasi Publik "KOLABORASI" Volume 1 Nomor 2. 2015. hlm 184.

arah tujuan organisasi. Sementara itu, strategi bisnis unit adalah strategi yang dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah untuk menerjemahkan strategi yang telah dibuat Manajer level puncak, ke dalam tujuan-tujuan organisasi lebih konkret. Strategi fungsional, lebih mengarah pada pelaksanaan fungsional organisasi seperti keuangan, SDM, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya³⁰.

1.5.3 Partisipasi Politik

Partisipasi dapat diartikan sebagai turut ambil bagian atau keterlibatan seorang anggota terhadap upaya menjalankan dan mencapai tujuan organisasinya. Lebih luas lagi, menurut Inu Kencana Syafie dikutip oleh Khoma yang dimaksud partisipasi juga menyangkut ambil bagian dalam pertanggungjawaban bersama³¹. Bila ditarik dalam kehidupan bernegara, khususnya di negara demokratis, jalannya suatu tata kelola negara tidak akan dapat lepas dari partisipasi warga negaranya, Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ramlan Surbakti yang menyampaikan bahwa partisipasi merupakan aspek penting dalam kehidupan demokrasi³².

Secara sempit, partisipasi warga negara dalam bidang politik selalu dikaitkan dengan aktivitas memilih dan atau mencalonkan diri sebagai pejabat publik dalam suatu pemilihan umum. Pemilihan umum bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat. Banyak ahli yang mendefinisikan bahwa partisipasi politik lebih luas dari sekedar *election activity*. Dalam

³⁰ Quadrat Nugraha, *Op.cit*, hlm. 8

³¹ Khoma. *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Pembangunan Desa*. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA. Volume 1 nomor 2. 2015. hlm 214

³² Ramlan Surbakti, *Op.cit*. hlm 140

bukunya *Memahami Ilmu Politik*, Ramlan Surbakti mencoba mendefinisikan Partisipasi Politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya³³. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik tidak hanya aktifitas memilih pejabat publik dan/atau dipilih sebagai pejabat publik dalam suatu pemilihan umum. Partisipasi Politik dapat berupa upaya warga negara biasa dalam pemerintahan untuk mempengaruhi atau ikut menentukan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Menurut tipologinya, Ramlan Surbakti mengkatagorikan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Partisipasi Aktif, terlibat dalam kegiatan politik termasuk dalam pembuatan kebijakan.
2. Partisipasi pasif, sebatas melaksanakan kebijakan yang ada.

Selain menekankan mengenai bentuk partisipasi politik, Ramlan Surbakti juga menekankan bahwa partisipasi politik dilakukan oleh warga negara biasa. Hal ini tampak serupa dengan pendapat dari Milbrath dan Goel yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh *private citizen* yang tujuannya untuk mempengaruhi atau mendukung pemerintah dan politik³⁴. Yang dimaksud dengan *private citizen* ialah warga negara yang tidak menduduki jabatan publik. Pendapat dari Ramlan Surbakti mengenai bentuk partisipasi politik, juga didukung oleh pendapat ahli

³³ Ramlan Surbakti. *Loc.cit*

³⁴ Jan W. van Deth, *Studying Political Participation: Towards a Theory of Everything?*. Conference: Joint Sessions of Workshops of the European Consortium for Political Research. 2001. hlm. 4.

lainnya yaitu Miriam Budiarmo yang mencoba mendefinisikan partisipasi politik sebagai

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung. Mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action dan sebagainya.³⁵

Dalam definisi tersebut, Miriam Budiarmo memberi lebih banyak contoh partisipasi politik selain kegiatan dalam pemilihan umum. Disebutkan bahwa partisipasi politik dapat berupa menghadiri rapat umum, membangun kontak dengan pejabat publik dan juga menjadi anggota suatu gerakan sosial. Partisipasi politik menurut jenisnya dapat dibagi menjadi partisipasi konvensional dan nonkonvensional. Partisipasi konvensional merupakan bentuk partisipasi yang wajar, seperti pemungutan suara, diskusi politik, bergabung dalam kelompok kepentingan, hingga berkomunikasi dengan pemangku kepentingan atau pejabat publik. Sementara kegiatan yang termasuk partisipasi nonkonvensional meliputi, demonstrasi, pemogokan kerja, pembakaran, bahkan hingga kudeta³⁶. Huntington dan Nelson mencoba mengklasifikasi bentuk partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, antara lain :

³⁵ Miriam Budiarmo. *Op.Cit.* hlm 367

³⁶ Putri Yolanda, H., & Halim, U. *Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019*. CoverAge: Journal of Strategic Communication, Vol. 10. No.2, 2020. hlm 32

1. Electoral Activity,

Kegiatan yang mencakup pemberian suara, memberi sumbangan untuk kampanye, mengikuti kegiatan kampanye, bekerja untuk proses pemilihan, dan segala bentuk tindakan yang ditujukan mempengaruhi hasil dari pemilihan umum.

2. Lobbying

Kegiatan yang dilakukan perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat pemerintahan atau pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan-keputusan mereka yang menyangkut persoalan di masyarakat.

3. Kegiatan Organisasi

Kegiatan tergabung dalam suatu organisasi, sebagai anggota maupun pemimpin dengan tujuan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Contacting

Tindakan perorangan yang dilakukan untuk menjalin koneksi dengan pejabat dalam rangka mendapatkan keuntungan dan manfaat hanya untuk dirinya sendiri atau hanya segelintir orang.

5. Violence

Kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian orang-orang lain, baik secara fisik maupun harta benda.³⁷

³⁷ Damsar, *Pengantar Ilmu Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 188-189

Selain berkaitan dengan bentuk partisipasi, definisi yang disampaikan oleh Miriam Budiarmo juga menekankan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan baik itu oleh perorangan maupun oleh suatu kelompok. Menjadi anggota suatu gerakan sosial, merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi politik yang dilakukan dalam kelompok. Menurut jumlah orang yang melaksanakan partisipasi, tak jauh berbeda dengan Miriam Budiarmo, Huntington dan Nelson juga memandang bahwa partisipasi politik dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Hal ini disampaikan oleh Huntington dan M. Nelson melalui definisi partisipasi politik menurut kedua ahli ini. Menurut Huntington dan M. Nelson yang dikutip dari Miriam Budiarmo, partisipasi politik di definisikan sebagai ;

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.³⁸

Selain melihat dari aspek jumlah yang terlibat dalam partisipasi, Huntington dan M. Nelson juga berpendapat bahwa partisipasi politik dapat dilakukan secara spontan atau terorganisir. Yang dimaksud spontan ialah ketika keinginan untuk berpartisipasi datang dari diri individu itu sendiri. Sementara itu yang dimaksud terorganisir adalah ketika partisipasi yang dilakukan oleh individu digerakan atau dimobilisasi oleh pihak lain diluar individu tersebut tersebut. Lebih dari itu, mereka juga memperluas definisi

³⁸ Miriam Budiarmo. *Op.cit.* hlm 368.

partisipasi politik dengan menganggap bahwa partisipasi politik dapat berupa kekerasan dan juga aktifitas yang ilegal.

Menurut Arbit Sanit dalam Sastroadmijo (1995) yang dikutip dari Suharno, partisipasi politik setidaknya memiliki tiga fungsi, antara lain;

1. Sebagai bentuk dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya serta sistem politik yang ada
2. Sebagai upaya menunjukkan kekurangan dari pemerintah
3. Sebagai tantangan bagi penguasa dalam upaya melakukan perubahan struktural dalam pemerintahan dan sistem politik dengan menjatuhkan pihak yang berkuasa melalui huru-hara, kerusuhan, atau kudeta.³⁹

Selain itu, menurut Suharno, partisipasi politik memiliki pula fungsi bagi pemerintah, fungsi partisipasi politik bagi pemerintah tersebut meliputi :

1. Mendorong berjalannya program pemerintah, dan menjadi salah satu indikator bahwa program tersebut didukung oleh masyarakat.
2. Sebagai salah satu institusi yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat, dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.
3. Sebagai sarana kritik dan saran bagi pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan⁴⁰

Dalam melakukan suatu partisipasi politik, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak ahli mencoba untuk merumuskan faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ramlan Surbakti, berpendapat ada

³⁹ Suharno. *Diktat Kuliah Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, UNY. Hlm 28

⁴⁰ Suharno. *Ibid*. Hlm 29

dua variable yang mempengaruhi partisipasi politik individu. Pertama, kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, sebagai warga negara individu berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, hak ini dapat dapat mendorong individu tersebut berpartisipasi dalam politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang upah minimum dan tenaga kerja asing. Sementara itu untuk kewajiban, salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia ialah kewajiban menjunjung tinggi hukum, dengan kewajiban ini dapat mendorong warga negara untuk turut mengawasi pelaksanaan hukum oleh pemerintah. Variable kedua ialah bagaimana penilaiannya dan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Milbrath, ada beberapa faktor yang mendorong partisipasi politik Individu. Dikutip dari Maran (2007), setidaknya ada 5 faktor yang mendorong partisipasi politik, meliputi :

a) Kepekaan Individu

Kepekaan individu terhadap rangsangan politik sangat mendorong minat untuk berpartisipasi. Rangsangan disini dapat berupa diskusi politik, maupun pemberitaan dari media massa.

b) Karakteristik Pribadi

Faktor ini menyangkut tingkat kepedulian individu terhadap permasalahan disekitar. Permasalah yang dimaksud menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi disekitarnya.

c) **Karakteristik Sosial**

Karakteristik sosial yang dimaksud menyangkut suku, ras, etnis, dan juga agama. Di mana masing masing karakteristik ini memiliki nilai yang dijunjung dan nilai-nilai ini dapat mempengaruhi persepsi maupun tindakan yang diambil individu termasuk di dalam politik. Kecenderungan individu untuk memperjuangkan tegaknya nilai tersebut

d) **Kondisi Politik**

Kondisi politik yang kondusif, aman, dan terbuka akan menimbulkan rasa senang dan minat untuk berpartisipasi didalamnya. Sementara sebaliknya, jika politik dipenuhi ancaman dan tindakan brutal.

e) **Pendidikan Politik**

Merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik individu, dengan tujuan individu paham dan mau terlibat dalam aktivitas politik.⁴¹

Menurut Milbrath (1965) dikutip dari D.Ruedin, berdasar tingkat partisipasinya, partisipasi politik dapat dikelompok ke dalam beberapa katagori meliputi:

1. Spektator, mereka yang berpartisipasi pada tingkat dasar, seperti ikut dalam pemilihan dengan memberikan suaranya, atau menghadiri diskusi politik.
2. Transisional, mereka yang mulai melakukan kegiatan politik secara aktif dan bersentuhan dengan partai seperti memberikan sumbangan, selain itu

⁴¹ Ade Aditia Armi. *Op.cit*, hlm 6

juga dapat berupa menghadiri orasi-orasi politik, serta melakukan hubungan dan komunikasi dengan pejabat publik.

3. Gladiator, mereka yang sangat aktif dalam kegiatan politik terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Berbagai kegiatan tersebut, antara lain aktif sebagai anggota partai, pejabat publik, kandidat dalam pemilihan umum, maupun hanya sebagai tim kampanye⁴²

1.6. Operasionalisasi konsep

1.6.1. Strategi Gereja Katolik

Strategi Gereja Katolik adalah serangkaian rencana mengenai tindakan yang akan diambil oleh Gereja Katolik dalam upaya mewujudkan tujuannya, dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud ialah meningkatkan partisipasi politik umat Katolik.

1.6.2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah keterlibatan umat Katolik dalam bentuk partisipasi konvensional yaitu terlibat dalam bidang politik, untuk turut memberikan suara, menentukan pejabat publik, mengikuti kontestasi, menjadi penyelenggara atau pengawas dalam kontestasi, turut mengawasi dan mengkritisi pemerintah, dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

⁴² D. Ruedin. *Testing Milbrath's 1965 Framework of Political Participation: Institution and Social Capital*. Contemporary Issues and Ideas in Social Science. 2007. hlm 9-10

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang ada dan terjadi secara alamiah. Fenomena yang terjadi alamiah, berarti fenomena yang terjadi tanpa adanya manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang mendalam, bersifat deskriptif, data yang terkumpul banyak dijelaskan dengan kata-kata narasi. Teknik pengumpulan sumber data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan peneliti sebagai instrumen penelitian yang utama, peneliti harus mampu untuk bertanya, memotret situasi, serta menganalisis supaya dapat menemukan makna yang jelas dari fenomena yang diteliti. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, suatu nilai dibalik data yang tampak⁴³. Dalam pengumpulan data, dilakukannya *triangulasi* atau penyilangan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam.

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV.Afabeta. 2009. hlm 9

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian atau menjadi tujuan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, difokuskan untuk mengkaji lebih dalam strategi yang dilakukan Gereja Katolik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik di Keuskupan Agung Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan juga *snowball sampling* berdasarkan saran informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, informan dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster. Klaster pertama, sebagai informan utama adalah Klaster Gereja Keuskupan Agung Semarang. Sementara itu, untuk triangulasi dua klaster lainnya adalah Klaster Lembaga Negara dan Klaster umat Katolik.

Dalam Klaster Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang, Pastor Raymandus Sugihartanta Pr, selaku Ketua dari PK4AS menjadi informan utama Dalam upaya memperkaya informasi, berbekal saran dari Pastor Raymundus Sugihartanta, maka peneliti melakukan interview kepada Pastor YR. Edy Purwanto, Pr. Selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, yang juga telah lama memiliki konsen dalam bidang politik, baik di tingkat Keuskupan maupun KWI. Peneliti juga berupaya mencari perspektif lain dari Pastor Katolik yang selama ini tidak terlalu fokus dalam bidang politik, maka peneliti menghubungi dan melakukan interview dengan Pastor Bernardus

Rukyanto, selaku Pastor Katolik dan juga Akademisi di Universitas Sanata Dharma.

Klaster selanjutnya adalah Klaster Lembaga Negara, di mana berisikan informan dari KPU Jawa Tengah dan Bawaslu Jawa Tengah. KPU Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Diana Ariyani. Dalam interview dengan KPU Jawa Tengah, banyak mengumpulkan informasi mengenai sinergi dan upaya yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam upaya meningkatkan partisipasi umatnya dalam *elektoral activity*. Tidak hanya sebagai kontestan dan pemilih, peneliti juga mengulik lebih dalam upaya Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang untuk mendorong umatnya terlibat dalam penguasaan partisipatif. Maka keterangan dari Bawaslu Jawa Tengah diperlukan untuk melihat sinergi dan strategi yang ada, dalam hal ini interview dengan Bawaslu dilakukan kepada Komisioner Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga, Muhammad Roffiudin.

Klaster umat Katolik sendiri diisi oleh informan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) katolik. Ormas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Semarang, memberikan keterangan melalui Ketua Presidiumnya langsung, Gabriela Adeline. Selain memberikan informasi kepada peneliti, PMKRI juga menyarankan untuk mengumpulkan informasi dengan interview kepada VoxPoint, selaku salah satu ormas Katolik yang konsen dalam bidang politik. Oleh karena itu, peneliti menghubungi Ketua VoxPoint Jawa Tengah,

Kristian Hardianto. Selain dua ormas tersebut, peneliti juga mengumpulkan informasi dari Stephanus Agus, Ketua Pemuda Katolik Jawa Tengah. Informan dari ormas, memberikan informasi dan gambaran dari perspektif umat Katolik, mengenai bagaimana selama ini Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang mendorong partisipasi umatnya dalam politik. Perspektif umat lainnya juga peneliti hadirkan, melalui informasi yang peneliti dapat melalui interview dengan Antonius Binawan, umat Katolik yang pada Pemilu 2019 turut secara langsung menjadi kontestan.

1.7.4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian berdasarkan tempat di mana fenomena yang akan dikaji terjadi secara alamiah. Lokasi dalam penelitian ini ialah wilayah Keuskupan Agung Semarang di Provinsi Jawa Tengah

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁴⁴. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

⁴⁴ Sugiyono. *Ibid*, hlm 224

a) **Teknik Pengamatan atau Observasi**

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap suatu fenomena, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut⁴⁵. Teknik Observasi, dalam penelitian kualitatif observasi diklarifikasikan menurut tiga cara. Pertama, pengamat bisa bertindak sebagai partisipan. Kedua, observasi dapat dilaksanakan secara terstruktur atau penyamaran. Ketiga, observasi tak terstruktur, adalah observasi yang digunakan pada penelitian di mana fokus yang diamati belum pasti. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi secara partisipan, yaitu sebagai umat Katolik yang mendengarkan penyampaian Surat-surat Gembala yang terkait dengan politik, seperti surat gembala menyambut pemilu 2019 dan surat gembala menyambut Hari Kemerdekaan RI ke 73 tahun 2018. Selain itu, peneliti juga mengikuti ibadah dalam rangka HUT RI ke 73, yang banyak menyinggung mengenai pesan politik. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan observasi strategi Gereja Katolik pada tingkat Paroki untuk memperkenalkan umatnya yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 serta sinergi Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dengan KPU melalui Relawan Demokrasi KPU Kota Semarang.

b) **Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

⁴⁵ Sugiyono. *Ibid*, hlm 226

makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini teknik wawancara digunakan peneliti di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan sembilan informan dari tiga klaster. Adapun penentuan informan dilakukan dengan dua teknik yaitu purposive sampling, di mana peneliti menunjuka langsung informan yang dianggap dapat memberikan informasi seputar fokus penelitan, antara lain dengan memilih informan Pastor Raymundus Sugihartanta, KPU Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah, PMKRI cabang Semarang, Pemuda Katolik Jawa Tengah, Pastor Bernadur Rukyanto, dan Antonius Binawan. Sementara itu, dilakukan pula snowball sampling, berdasarkan saran informan, seperti menentukan Pastor YR Edy Purwanto sebagai informan atas saran dari Pastor Raymundus Sugihartanta dan menambahkan VoxPoint sebagai informan atas saran dari PMKRI cabang Semarang.

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan membaca dokumen, buku, karya, gambar atau catatan berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca dan mengkaji dokumne-dokumen resmi gereja serta buku-buku literatur yang terkait dan juga penelitian-penelitian terdahulu. Studi pustaka peneliti lakukan dengan membaca Kitab Hukum Kanonik, yang menjadi dasar hukum Gereja selama ini. Selain itu, juga dokumen-dokumen Gereja

seperti dokumen tentang Ajaran Sosial Gereja, Kerasulan Awam, hingga dokumen hasil Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes*. Tidak hanya itu, peneliti juga mempelajari dokumen Gereja pada tingkat lokal, dengan membaca Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang 2016-2020, Arah Pastoral Keuskupan Agung Semarang 2018, serta berbagai surat gembala yang dikeluarkan baik oleh Keuskupan maupun KWI.

1.7.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan. Dalam penelitian ini instrumen kunci adalah peneliti sendiri kemudian dibantu dengan adanya pedoman pertanyaan (*interview guide*). Pedoman pertanyaan (*interview guide*) merupakan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat diperoleh jawaban yang luas serta mendalam dari informan. Dalam *Interview guide* peneliti menghendaki pendapat yang lebih luas, lebih rinci dan lengkap.

1.7.7. Analisa data

Kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles dan Huberman, bahwa analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data.

1. Pengumpulan Data

Proses di mana peneliti terjun ke lokasi penelitian, bertemu dengan informan dan dengan menggunakan instrumen penelitian dilakukan pengumpulan data dari informan. Dalam pengumpulan data dilakukan pula teknik triangulasi untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dan memperluas data yang ada.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak maka perlu pencatatan secara rinci dan teliti. Data yang beragam ini kemudian perlu direduksi untuk mempermudah analisis. Mereduksi berarti merangkum, mengambil data pokok yang penting dengan mencari pola dan tema sesuai kebutuhan penelitian. Dalam proses reduksi data ini, peneliti akan melakukan kategorisasi data yang masuk, dengan berpedoman pada tujuan penelitian, sehingga data yang dianggap tidak penting akan dibuang oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam suatu laporan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dengan uraian ataupun deskripsi, dalam bentuk teks naratif mengenai data yang sudah didapat dan mengenai hubungan antar kategori data. Teks Naratif yang disusun juga dapat digunakan menjelaskan pola-pola pada fenomena yang terjadi, yang telah ditemukan peneliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif, ditarik sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun di awal. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan data dan bukti yang digunakan untuk menguji teori yang digunakan dalam penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data ini saling berkaitan satu sama lain. diawali dengan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta teknik triangulasi supaya menjaga kevalidan informasi. Kemudian data yang telah didapat akan direduksi, peneliti akan mengambil data yang penting dan sesuai dengan pokok penelitian, dilakukan pula kategorisasi data. Selanjutnya, data yang telah direduksi dan dikategorikan akan ditampilkan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan mengenai data yang didapat, hubungan antar kategori data, dan pola dari fenomena yang terjadi. Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah di awal, dalam penarikan kesimpulan terjadi penyilangan antar teori yang digunakan dan data yang diperoleh dari penelitian.